

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharismi. *Dasar-dasar Research*. Bandung: Tarsuto, 1995.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 2006.
- Broto, Al-Wisnu. *Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Aspek Kajian*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997.
- Darmabrata, Wahjono & Ahlan Sjarif Surini. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2016.
- Fauzan. *Kamus Hukum & Yurisprudensi*. Jakarta: Gramedia, 2018.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Latief, Mujahid A. *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi Jilid II*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007.
- Lindsey, Tim & Helen Pausacker. *Crime and Punishment in Indonesia*. Oxon: Routledge, 2021.
- Marks, Stephan P. *Human Right: A Brief Introduction*. Cambridge: Harvard University, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Masglow, Abraham Harold. *Motivation and Personality*. New York: Harper & Row Publisher, 1970.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Liberty Yogyakarta, 2006.
- Moelong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992

- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim*. Jakarta: Pusdiklat MA-RI, 2004..
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Qodritillah, Meity Taqdir. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Alfabeta, 2017.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Waluyo, Bambang. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- World Jurist Association. *Law and Judicial Systems of Nations*. Washington D.C: World Jurist Association, 2002.
- Zaidah, Yusna. *Peradilan Agama di Indonesia*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.

JURNAL

- Aisyah, Nur. “Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia”. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2018): 73-92.
- Djuniarti, Evi. “Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 445-461.
- Ferevaldy, Adisti Pratama & Ghansham Anand. 2017. “Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)”. *Jurnal Hukum Acara Perdata* 3, no. 2 (2017): 205-226.

Muslimin, J. M. "The Actualization of Justice in the Settlement of Joint Assets Due to Divorce: Comparative Analysis of Decisions of the Religious Court". *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 12, no. 2 (2020): 176-190.

SKRIPSI

Ariani, Suci. Skripsi. *Hakim Tunggal Pada Perkara Dispensasi Kawin (Studi Pengadilan Agama Marabahan)*. (Banjarماسin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2022).

Ishaq, Maulana. Skripsi. *Penggunaan Hakim Tunggal Pada Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

Puspasari, Via. Skripsi. *Pertimbangan Hakim Tunggal Dalam Perkara Dispensasi kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019*. (Purwekerto: UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2021).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Jakarta.

Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. PERMA No. 5 Tahun 2019. Jakarta.

Mahkamah Agung. *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemeriksaan dan Memutus Perkara dengan Hakim Tunggal*. SEMA No. 3 tahun 1965. Jakarta.

Mahkamah Agung. *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Sidang-sidang dengan Hakim Tunggal*. SEMA No. 4 tahun 1984. Jakarta.

INTERNET

KBBI. *Arti Kata Hakim di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. KBBI Web. <http://kbbi.web.id/hakim>, (n.d).

KBBI. *Arti Kata Penyelesaian di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. KBBI Lektor. <https://kbbi.lektur.id/penyelesaian>, (n.d).

Pramesti, Tri Jata Ayu. *Ini Alasan Jumlah Hakim Harus Ganjil*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-alasan-jumlah-majelis-hakim-harus-ganjil-lt52b2859a212d3>, (2013, Desember 21).

PTTUN Surabaya. *Kode Etik Hakim*. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. <http://pttun-surabaya.go.id/kode-etik/>, (2015, September 13).